

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan Zoon Politicon hal ini berarti manusia sebagai makhluk sosial selalu berusaha untuk hidup berkelompok dan bermasyarakat¹ yang melakukan perbuatan ekonomi dengan cara pertukaran “*barter*” sebagai transaksi pembayaran yang kemudian seiring bergantinya waktu diganti dengan uang dan koin karena akan terjadi ketimpang tindihan dalam pelaksanaannya yakni pembagian kerja yang kompleks merupakan suatu keadaan yang sangat sukar dibayangkan seandainya tidak ada satu unsur baru yang merupakan penyempurnaan besar yaitu pemakaian uang. Pergantian barter ke penggunaan koin dan uang ini dikarenakan pemakaian sistem barter mempunyai kelemahan², akan tetapi seiring berkembangnya arus globalisasi, maka mulailah digunakan benda yang memiliki nilai tukar sama dengan uang³.

Dalam dunia bisnis, seorang pembisnis (*business man*) lebih condong memilih alat pembayaran dengan menggunakan non-uang dan koin, mereka lebih menyukai pembayaran yang sifatnya praktis dan aman yang dikenal

¹ R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, 2002, Jakarta : sinar grafika. Hal. 297 menjelaskan.

² Paul A. Samuelson. 1975. Teori Ekonomi. Jakarta : Bharatara 1975 c.2, Hal. 71 bandingkan juga dengan buku Mulia Nasution. 1997. Teori Ekonomi Makro (pendekatan pada perekonomian Indonesia). Jakarta : Djambatan, Hal. 139-140 tentang tiga keuntungan yang diperoleh dari uang yakni sebagai alat tukar-menukar, satuan nilai, dan alat menyimpan kekayaan .

³ Jenis uang menurut buku N. Gregroy Mankiw. 2003. Pengantar Ekonomi edisi kedua (jilid 2). Jakarta : Erlangga. Hal.150 ada 2, yakni : uang komoditi (*commodity money*) adalah uang yang berbentuk suatu komoditi yang memiliki nilai intrinsik (*intrinsik value*) merujuk pada suatu benda atau hal yang tetap bernilai sekalipun tidak digunakan sebagai uang , sedangkan uang fiat adalah uang yang tidak memiliki nilai intrinsik, yang berlaku sebagai uang karena ditetapkan demikian oleh pemerintah.

dengan surat berharga (Commercial Paper (CP), Negoitable Instrument, Waadre van papieren)⁴. Surat berharga ini mulai dikenal dan dipergunakan dalam transaksi perdagangan pada abad pertengahan (The Middle ages) (JL.Franscona, 1954:407) di Laut Tengah di negara-negara kota (Cities States). Pada awalnya, aktifitas transaksi perdagangan tidak timbul permasalahan, karena para pedagang beraktifitas di kota masing-masing, namun pada perkembangan berikutnya para pedagang beraktivitas tidak saja di kota masing-masing (pada saat itu dikenal dengan negara kota) , tetapi juga beraktivitas dengan pedagang diluar kota mereka, sehingga mereka mendapat kesulitan untuk melakukan pembayaran, apa alat yang dapat digunakan dan diakui oleh masing-masing pihak untuk melakukan transaksi bisnis tersebut. Untuk itu timbul ide untuk menciptakan surat berharga di kalangan pedagang.

Bentuk dari surat berharga ini tercantum pula dalam Pasal 1 angka (10) UU No. 10 tahun 1998 yakni “surat pengakuan hutang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, atau dari kepentingan penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang” ada 2 macam surat dagang, yakni didalam KUHD yang berupa Surat Wesel, Surat Sanggup, Surat Cek, Carter partai, Konosemen, Delivery-order, Surat

⁴ Surat berharga adalah surat yang sengaja diterbitkan sebagai pelaksanaan pemenuhan suatu prestasi yang berupa pembayaran sejumlah uang atau surat bukti tuntutan utang, pembawa hak dan mudah dijual belikan. dalam prakteknya dikenal pula surat yang berharga akan tetapi surat yang berharga ini tidak dapat dipakai sebagai alat pembayaran, karena surat yang berharga ini hanya berharga untuk orang yang namanya tertera dalam surat tersebut. Dengan ciri : mudah dialihkan dan pengalihan para kreditur tidak perlu diberitahukan kepada debitur. Disadur dari buku Abdulkadir Muhammad. 1993. Hukum Dagang tentang Surat-surat Berharga. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. Hal.4; H.M.N Purwosutjipto. 1987. Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia (Hukum Surat Berharga). Jakarta : Djambatan. Hal. 5 dan R.Ali Rido. 1988.Hukum Dagang (tentang surat berharga, perseroan firma, perseroan komanditer, keseimbangan kekuasaan dalam PT dan penswastaan BUMN). Bandung : Remadja karya. Hal.7-8.

Saham dan Promes atas tunjuk atau premes untuk pembawa. dan di Luar KUHD yang berupa Ceel, Surat Obligasi, Sertifikat, Sertifikat deposito, Sertifikat Bank Indonesia, Bilyet Giro, Surat Berharga Komersial dan Kartu Kredit..⁵

Pada saat ini perkembangan surat berharga di Indonesia dalam kaitannya dengan kegiatan bisnis, tidak terlepas dari kebijakan liberalisasi perbankan oleh pemerintah dalam bentuk paket-paket kebijakan di bidang perbankan. Akibat dari kebijakan tersebut, jumlah bank dan kantor bank bertambah dengan pesat disertai dengan meningkatnya persaingan dan berkembang produk-produk baru “Finansial Instruments” disamping berkembangnya penggunaan surat berharga Pasar Uang dan Warkat-Warkat Perbankan. Adapun penggunaan surat berharga dalam praktik dan kaitannya dengan kegiatan perbankan, antara lain :

- a. Dari aspek lalu lintas bisnis, penggunaan surat berharga lebih praktis, aman dan lancar sistem pembayaran.
- b. Dari aspek usaha perbankan, maka kegiatan pembelian, penjualan, penyimpanan (custodion), memberikan jaminan surat berharga dan warkat-warkat perbankan, merupakan produk bisnis perbankan dewasa ini, hal ini berkaitan dengan usaha menghimpun dana, baik kepentingan masyarakat maupun untuk kepentingan pembangunan.

Bilyet Giro yang merupakan produk dari bank ini merupakan salah satu bentuk alat bayar yang relatif baru berkembang di Indonesia. Bentuk alat bayar ini masih diperdebatkan apakah termasuk dalam kategori surat berharga

⁵ Joni Emirzon. 2002. Hukum Surat Berharga dan Perkembangan Di Indonesia. Jakarta : Prenhallindo, hal. 71-73

murni atau tidak. Karena dari sifat dan bentuk agak berbeda dengan surat berharga pada umumnya.

Bilyet Giro adalah jenis surat berharga yang tidak diatur dalam KUHD, karena Bilyet Giro adalah surat berharga yang tumbuh dalam praktik karena kebutuhan dalam lalu lintas pembayaran secara giral. Bilyet giro berasal dari kata “ Bilyet” yaitu bahasa Belanda yang artinya “surat” dan kata “giro” berarti simpanan pada bank yang pengambilannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau dengan pemindahbukuan. Jadi yang dimaksud dengan bilyet giro adalah surat pemindahan sejumlah dana, pemindahan dimana berfungsi sebagai pembayaran. Bilyet giro diatur SEBI No.4 / 670 / UPPB / PBB, tanggal 24 Januari 1972 jo SK Direktur BI No.28 / 32 / KEP / DIR, tanggal 4 Juli 1995. Dalam pasal 1 huruf d SK BI No.28 / 32 / KEP / DIR / 1995 dengan tegas, *“Bilyet Giro diartikan adalah surat perintah dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada rekening pemegang yang disebutkan namanya”*.

Surat bilyet giro adalah tidak lain daripada surat perintah nasabah yang telah distandardiser bentuknya kepada bank penyimpan dana untuk memindah-bukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya pada bank yang sama atau pada bank lainya.⁶

Sebagaimana dikatakan dimuka bahwa penerbit bilyet giro membawa serta kewajiban menyediakan dana dalam bentuk rekening giro bagi

⁶ Emmy Pangaribuan Simanjuntak. 1982. Hukum Dagang Surat-Surat Berharga. Yogyakarta : Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM. Hal 189.

penerbitnya. Dari rekening giro inilah bank melaksanakan perintah yang dicantumkan dalam bilyet giro artinya sejumlah uang yang ditentukan dalam bilyet giro dikurangi dari rekening giro penerbit bilyet giro itu dan dibukukan kedalam rekening penerima bilyet giro.

Apabila rekening giro dari nasabah yang menerbitkan bilyet giro itu tidak mencukupi maka ini merupakan alasan bagi bank untuk menolak bilyet giro.⁷

Seiring berjalannya waktu ternyata bilyet giro tersebut tidak selalu memberikan solusi cerdas untuk masyarakat dalam meminimalis kecurangan, sehingga timbul berbagai permasalahan hukum di antara para pelaku bisnis saat ini. Untuk mengatasi perselisihan tersebut, mereka menggunakan aturan dikalangan pelaku bisnis berupa Hukum Dagang yang mereka sebut “Law of Merchant” dan peradilan hukum khusus bagi pedagang yang dikenal dengan istilah “Mercantile Court”, peradilan ini memiliki yuridiksi termasuk penyelesaian surat berharga⁸. Akan tetapi dalam perkara ini pihak pertama menggugat wanprestasi kepada pihak kedua dan pihak ketiga. Adapun kronologis kejadiannya bermula diawal bulan Desember tahun 2005, pihak ketiga memberikan bilyet giro(BG) kepada pihak kedua untuk ditukar dengan sejumlah uang. Kemudian pihak kedua melakukan perjanjian hutang piutang dengan pihak pertama. Di dalam perjanjian tersebut pihak kedua memberikan 2 (dua) lembar bilyet giro (BG) sebagai alat pembayaran sekaligus jaminan hutang. Namun ketika setelah jatuh tempo sesuai waktu yang dijanjikan oleh pihak kedua, maka

⁷ Emmy Pangaribuan Simanjuntak. Op.Cit. Hal.192.

⁸ Joni Emirzon. 2002. Hukum Surat Berharga dan Perkembangannya di Indonesia. Jakarta : Prenhallindo. Hal.6.

pihak pertama bermaksud untuk mencairkan 2 (dua) lembar bilyet giro tersebut pada Bank yang ditunjuk, akan tetapi setelah pihak pertama menanyakan pada Bank yang ada, petugas Bank menolak dengan mengatakan 2 (dua) lembar bilyet giro (BG) tersebut tidak ada dananya atau kosong, bahkan rekeningnya telah ditutup. Dalam perbuatan para pihak yang memberikan bilyet giro kosong hal ini diklasifikasikan sebagai perbuatan *wanprestasi* atau *perbuatan melawan hukum*. Lalu yang menjadi problematikanya adalah atas kemauan siapa yang membuat bilyet giro kosong sebab berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 5096 K/ PDT/1998 tanggal 28 April 2000 bahwa pembayaran atau pemberian dengan bilyet giro adalah sama dengan pengakuan hutang, oleh karenanya apabila ada masalah hukum dengan bilyet giro kosong maka pertanggung jawabannya dilimpahkan kepada pemilik bilyet giro kosong tersebut sesuai dengan surat edaran mengenai daftar hitam nasional penarik cek dan/atau bilyet giro kosong No.9 / 13 / DASP-jakarta, 19 Juni 2007

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PENJAMINAN BILYET GIRO (BG) KOSONG SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN HUTANG (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Sukoharjo)”**.

B. Perumusan Masalah

Permasalahan adalah pernyataan yang menunjukkan adanya jarak antara harapan dengan kenyataan, antara rencana dengan pelaksanaan, antara das

sollen dengan das sein⁹. Berdasarkan apa yang telah tersebut dalam latar belakang masalah, maka dapat penulis rumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana penilaian hakim dalam menentukan pembuktian atas pertanggung jawaban hukum dalam perkara bilyet giro kosong tersebut?
2. Bagaimana pertimbangan hukum dari hakim dalam menentukan putusan terhadap perkara bilyet giro kosong yang telah terbukti?

C. Tujuan Penelitian

Penulisan dari masalah ini mempunyai tujuan yaitu :

1. Mendiskripsikan penilaian hakim dalam menentukan pembuktian atas pertanggung jawaban hukum dalam perkara bilyet giro kosong.
2. Mendiskripsikan pertimbangan hukum dari hakim dalam menentukan putusan terhadap perkara bilyet giro kosong yang telah terbukti.

⁹ Roni Hanitijo Soemitro, 1990, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia Indonesia, Hal.36-38

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan masalah yang dikaji dalam penelitian ini dan tujuan yang akan dicapai maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Bagi Penulis

- a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis mengenai penilaian hakim dalam menentukan pembuktian atas pertanggung jawaban hukum dalam perkara bilyet giro kosong tersebut.
- b. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis pada pertimbangan hukum dari hakim dalam menentukan putusan terhadap perkara bilyet giro kosong yang telah terbukti.
- c. Memberikan jawaban terhadap permasalahan-permasalahan yang hendak diteliti.

2. Manfaat Bagi Ilmu Pengetahuan

- a. Memberikan sumbangan pemikiran ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya dalam penilaian hakim dalam menentukan pembuktian atas pertanggung jawaban hukum dalam perkara bilyet giro kosong tersebut.
- b. Memberikan suatu gambaran nyata pertimbangan hukum dari hakim dalam menentukan putusan terhadap perkara bilyet giro kosong yang telah terbukti.

3. Manfaat Bagi Masyarakat

- a. Memberikan konsep kepada masyarakat mengenai model penilaian hakim dalam menentukan pembuktian atas pertanggung jawaban hukum dalam perkara bilyet giro kosong tersebut.
- b. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat terhadap pertimbangan hukum dari hakim dalam menentukan putusan terhadap perkara bilyet giro kosong yang telah terbukti.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan normatif empiris, yaitu mengamati penjaminan bilyet giro kosong tersebut terhadap pembayaran hutang yang dilihat dari aspek-aspek hukumnya yang diterapkan dalam fakta di lapangan sehingga dapat diketahui legalitas hukum dalam penjaminan bilyet giro kosong terhadap penjaminan hutang tersebut.

2. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif¹⁰. Yang berarti penelitian ini menggambarkan bagaimana putusan pengadilan terhadap tanggung jawab hukum atas bilyet giro kosong sebagai pembayaran hutang.

3. Sumber Data

¹⁰ Maksud dari deskriptif adalah suatu metode penelitian yang hanya menggambarkan atau melukiskan keadaan obyek yang akan diteliti. Winarno Surahman, 1989, Dasar dan Tehnik Riset, Bandung : Tarsito, Hal. 26.

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah tempat dimana data diperoleh. Dalam penulisan skripsi ini penulis akan menggunakan data sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Di maksudkan untuk mencari data-data sekunder dengan menggunakan bahan-bahan :

1) Bahan Hukum Primer

- a) KUH Perdata
- b) HIR
- c) SEBI No.4/670/UPPB/PBB/1972
- d) Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan
- e) SK Direktur BI No.28/32/KEP/DIR/1995
- f) SEBI No.9/13/DASP/2007
- g) Yurisprudensi

2) Bahan Hukum Sekunder :

Merupakan bahan-bahan yang mencakup atau juga diperlukan dalam penelitian ini, memberikan penjelasan-penjelasan dan tambahan terhadap bahan primer, yaitu literature yang ada hubungannya dengan tanggung jawab hukum terhadap penjaminan bilyet giro kosong dalam pembayaran hutang.

3) Bahan Hukum Tersier

- a) Kamus hukum.
- b) internet

b. Penelitian Lapangan

1) Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Sukoharjo, yang berkaitan dengan hakim dalam menentukan putusan terhadap penjaminan bilyet giro terhadap pembayaran hutang (studi kasus di pengadilan negeri sukoharjo) sehingga diharapkan dapat diperoleh data atau informasi yang cukup untuk menjawab permasalahan.

2) Subyek Penelitian

Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai subyek adalah hakim yang pernah memeriksa serta memutus kasus penjaminan bilyet giro terhadap pembayaran hutang.

4. Metode Pengumpulan data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode untuk mengumpulkan data sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan¹¹ yakni mengumpulkan, mempelajari, mengkaji ketiga bahan hukum diatas terkait dengan penjaminan bilyet giro kosong terhadap pembayaran hutang.

b. Studi Lapangan

Yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung terhadap obyek yang diteliti guna mendapatkan data primer, yang bertujuan untuk

¹¹ Mencari landasan teoritis dari permasalahan penelitiannya sehingga penelitian yang dilakukan bukanlah aktifitas yang bersifat " trial and error" . dilakukan dengan mempelajari kepustakaan dengan tujuan memperoleh data yang diperlukan. Bambang Sunggono. 1998. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. Hal. 114.

mencari kejelasan mengenai tanggung jawab hukum atas perkara bilyet giro kosong dan bagaimana hakim pengadilan negeri sukoharjo dalam menentukan putusan perkara mengenai penjaminan bilyet giro kosong terhadap pembayaran hutang, dilakukan dengan cara:

1) Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mencocokkan berkas-berkas perkara yang ada hubungannya dengan penulisan di Pengadilan Negeri Sukoharjo.

2) Wawancara (Interview)

Adalah proses dimana orang saling bertatap muka langsung dengan responden untuk menanyakan perihal pribadi responden, fakta-fakta yang ada dan pendapat (opinion) maupun persepsi diri responden dan bahkan saran-saran responden.¹² Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan hakim Pengadilan Sukoharjo yang memutus perkara ini. Sistem wawancara yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin, artinya terlebih dahulu dipersiapkan daftar pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada saat wawancara.¹³

¹² Bambang Waluyo, 2002, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta : Sinar Grafika, Hal.57.

¹³ Sutrisno Hadi, 1985, Metodolog Research Jilid II. Jogyakarta : Yayasan Penerbit Fakultas Hukum Psikologi UGM, Hal.26.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis data kualitatif,¹⁴ yang dilakukan dengan cara Peraturan, yurisprudensi yang ada hubungan dengan penjaminan bilyet giro yang ada dipadukan dengan pendapat responden di lapangan. Analisis kualitatif, dicari permasalahannya kemudian dapat ditarik kesimpulan.

6. Sistematika Skripsi

Untuk lebih mudah dalam melakukan pembahasan, penganalisisan, serta penjabaran substansi dari penelitian ini maka penelitian ini disusun dalam bentuk sistematika sebagai berikut :

1. BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pembatasan Masalah
- C. Perumusan Masalah
- D. Tujuan Penelitian
- E. Manfaat Penelitian
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Skripsi

2. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan umum mengenai Bilyet Giro
 - 1. Pengertian bilyet giro
 - 2. Pengertian bilyet giro kosong

¹⁴ Surakhmad Winamo. 1994. Metode dan Teknik dalam bukunya, Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik. Bandung : Tarsito. Hal.17.

3. Pengertian penjaminan bilyet giro
4. Pengertian alat pembayaran hutang
5. Pengertian tanggung jawab hukum
6. Dasar tanggung jawab hukum :
 - a. Tanggung jawab atas dasar wanprestasi
 - b. Tanggung jawab atas dasar perbuatan melawan hukum
7. Fungsi bilyet giro sebagai alat pembayaran hutang
8. Hubungan antara penyampaian bilyet giro kosong dengan alat pembayaran hutang
9. Pemberian ganti rugi atas dasar tanggung jawab hukum

B. Tinjauan mengenai pemeriksaan di Pengadilan

1. Menyusun surat gugatan
2. Pengajuan surat gugatan
3. Pemanggilan para pihak
4. Pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negeri :
 - a. Pembacaan surat gugatan
 - b. Jawaban Tergugat
 - c. Replik
 - d. Duplik
5. Pembuktian :
 - a. Pengertian pembuktian
 - b. Beban pembuktian
 - c. Penilaian pembuktian

- d. Alat bukti
- e. Kesimpulan dalam pembuktian
- 6. Putusan :
 - a. Pengertian putusan
 - b. Pertimbangan hakim dalam putusan
 - c. Macam-macam putusan hakim

3. BAB III HASIL PEMBAHASAN

- A. Hasil Penelitian
- B. Pembahasan
 - 1. Penilaian hakim dalam menentukan pembuktian atas pertanggung jawaban hukum dalam perkara biro gilyet kosong.
 - 2. Pertimbangan hukum dari hakim dalam menentukan putusan terhadap perkara biro gilyet kosong

4. BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran